

BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang Masalah

Kemiskinan merupakan masalah klasik yang sampai saat ini masih dihadapi Negara Indonesia. Masalah kemiskinan merupakan masalah yang kompleks dan multidimensional. Disebut masalah multidimensi karena kemiskinan berkaitan dengan ketidakmampuan akses secara ekonomi, sosial budaya, politik dan partisipasi dalam masyarakat.² Oleh karena itu, masalah kemiskinan ini menjadi prioritas dalam pembangunan nasional dan harus segera ditindak lanjuti.

Kemiskinan terjadi karena adanya masyarakat yang mengalami kekurangan dan ketidak mampuan dalam memenuhi kebutuhan hidup. Masyarakat tersebut tidak mampu mencapai tingkat minimal dari tujuan-tujuan yang telah ditetapkan. Tujuan yang dimaksud berupa konsumsi, kebebasan, hak mendapatkan sesuatu, dan menikmati hidup. Oleh karena itu tolak ukur kemiskinan bukan hanya hidup dalam kekurangan pangan dan tingkat pendapatan yang rendah, tetapi juga melihat tingkat kesehatan, pendidikan dan perlakuan adil dimuka hukum.³

Pemerintah melakukan upaya dua arah dalam mengatasi masalah kemiskinan ini. Upaya pertama dilakukan dengan melakukan pemenuhan

² Itang, *Faktor-faktor Penyebab Kemiskinan*, (Jurnal Keislaman, Kemasyarakatan, Kebudayaan : Vol.16, No.01, 2015) hal.2

³ Adisasmita, *Pembangunan Pedesaan Dan Perkotaan*, (Yogyakarta: Graha Ilmu, 2006)

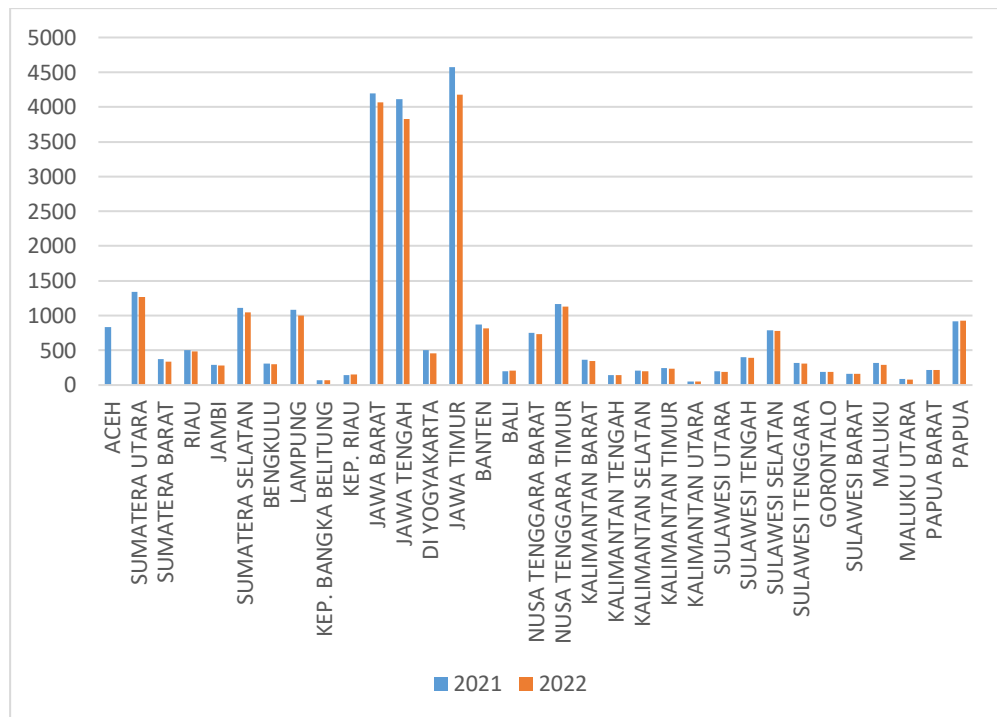
atas berbagai kebutuhan masyarakat miskin. Contohnya dengan adanya bantuan tunai langsung dari pemerintah dan berbagai program masyarakat miskin lainnya. Upaya kedua dilakukan dengan cara preventif atau pencegahan. Upaya ini merupakan pencegahan dari dalam, yaitu dengan menumbuhkan kesadaran pada masyarakat agar mau terbebas dari jeratan kemiskinan. Selain itu, berbagai program pelatihan dan pengembangan keterampilan juga dilakukan pemerintah agar masyarakat memiliki modal untuk dapat hidup mandiri dan tidak bergantung pada pihak lain.⁴

Selain berbagai program yang dilakukan, salah satu aspek penting dalam mengatasi masalah kemiskinan adalah tersedianya data kemiskinan yang akurat. Data kemiskinan ini digunakan untuk membandingkan angka kemiskinan dari tahun ke tahun. Dengan data tersebut, pemerintah dapat mengamati seberapa efektif suatu kebijakan yang telah dilakukan serta kebijakan yang seharusnya dilakukan di tahun selanjutnya.

Menurut data Badan Pusat Statistik, pada tahun 2021 hingga 2022, jumlah penduduk miskin yang ada di Indonesia mengalami penurunan. Hal ini mengindikasikan bahwa kebijakan yang diambil pemerintah diduga mampu mempengaruhi tingkat kemiskinan yang ada. Berikut data jumlah penduduk miskin di Indonesia yang disajikan berdasarkan wilayah yaitu 33 provinsi di Indonesia tahun 2021-2022.

⁴ Ferezagia, *Analisis Tingkat Kemiskinan di Indonesia*, (Jakarta : JSHT, 2023) hal.2

Gambar 1.1
Jumlah Penduduk Miskin berdasarkan Provinsi di Indonesia
Tahun 2021-2022



Sumber : Badan Pusat Statistik, diolah dengan Microsoft Excel 2013

Dari gambar 1.1 dapat dilihat bahwa pada tahun 2022 tingkat kemiskinan yang terjadi pada 33 provinsi di Indonesia mengalami penurunan dari tahun 2021. Provinsi Jawa Timur menjadi provinsi dengan jumlah penduduk miskin terbanyak yaitu sebanyak 4.573 ribu jiwa pada tahun 2021, dan 4.181 ribu jiwa pada tahun 2022. Sementara itu provinsi dengan jumlah penduduk miskin paling sedikit adalah Provinsi Kalimantan Utara, yaitu 53 ribu jiwa pada tahun 2021 dan 49 ribu jiwa pada tahun 2022.

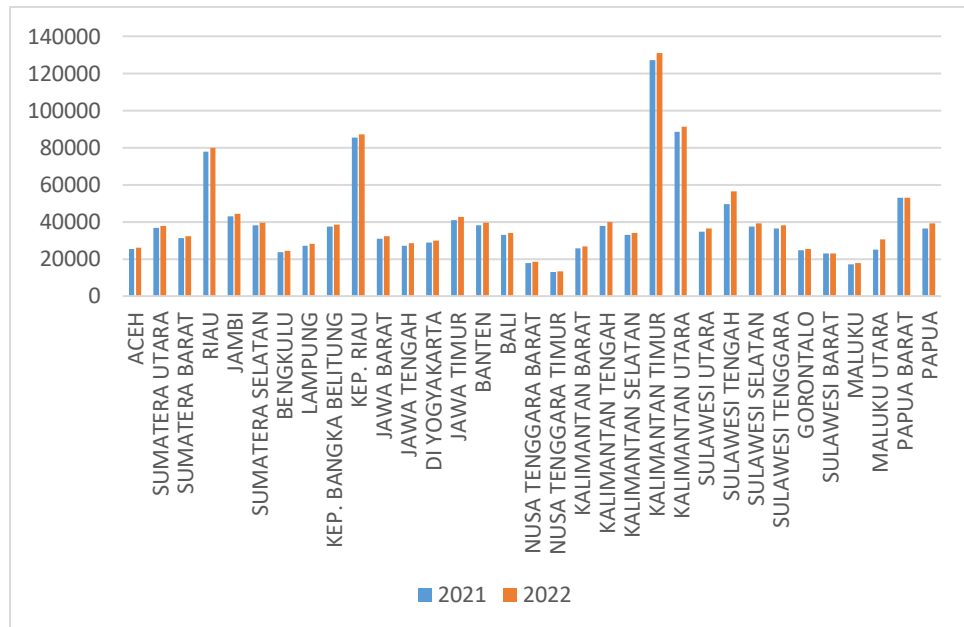
Masalah kemiskinan tidak terlepas dari kondisi pertumbuhan ekonomi yang terjadi pada suatu Negara. Secara umum, pembangunan disuatu negara sering dikaitkan dengan pertumbuhan output nasional dan pendapatan, sehingga terjadi hubungan segitiga antara pertumbuhan ekonomi, kemiskinan, dan ketimpangan. Ketiganya memiliki hubungan timbal balik yang saling mempengaruhi satu sama lain.

Pengentasan masalah kemiskinan yang ada dapat dilakukan dengan memajukan angka pertumbuhan ekonomi. Hal ini karena pertumbuhan ekonomi merupakan salah satu indikator penting dalam kesejahteraan. Oleh karena itu, pertumbuhan ekonomi menjadi salah satu syarat utama dalam menurunkan masalah kemiskinan. Namun kenyataannya, di banyak negara termasuk Indonesia, pertumbuhan ekonomi yang terjadi juga diikuti dengan peningkatan jumlah penduduk yang hidup dibawah garis kemiskinan.

Salah satu indikator untuk mengetahui kondisi ekonomi dan kinerja pembangunan di suatu Negara adalah dengan melihat Produk Domestik Bruto (PDB). PDB atas dasar harga berlaku menggambarkan nilai tambah barang dan jasa yang dihitung menggunakan harga pada tahun berjalan, sedangkan PDB atas dasar harga konstan dihitung menggunakan harga yang berlaku pada satu tahun tertentu sebagai tahun dasar. Sementara itu, untuk mengetahui kondisi ekonomi pada suatu wilayah provinsi, kabupaten atau kota, digunakan PDRB atau Produk Domestik Regional Bruto.

Berikut data Produk Domestik Regional Bruto berdasarkan provinsi di Indonesia tahun 2021-2022.

Gambar 1.2
PDRB per Provinsi di Indonesia Tahun 2021-2022



Sumber : Badan Pusat Statistik, diolah dengan Microsoft Excel 2013

Dari gambar 1.2 dapat dilihat bahwa dari tahun 2021 ke tahun 2022 terjadi peningkatan pada pertumbuhan ekonomi di 33 provinsi di Indonesia. Kalimantan Timur menjadi provinsi dengan PDRB tertinggi, disusul Kalimantan Utara, Kepulauan Riau, dan Riau. Jumlah ini juga selalu meningkat dibanding tahun 2021. Sementara itu peringkat ke 5 ditempati oleh Papua Barat pada tahun 2021, dan Sulawesi Tengah pada 2022.

Meskipun pertumbuhan ekonomi yang terjadi sudah mengalami peningkatan, namun hal tersebut tidak menjadikan jumlah penduduk miskin pada tahun tersebut menurun. Hal ini berarti, pertumbuhan ekonomi yang terjadi diduga belum mampu menurunkan tingkat kemiskinan di Indonesia.

Setiap dekade, terjadi perkembangan strategi dalam mengatasi masalah kemiskinan di Indonesia. Strategi tersebut mulai dari penciptaan lapangan kerja, peningkatan pendapatan, pengembangan kesehatan dan pendidikan, perlindungan sampai dengan pemberdayaan kaum miskin. Secara teoritis, upaya pengentasan kemiskinan mensyaratkan adanya pertumbuhan ekonomi yang berkualitas.

Dalam rangka menciptakan pertumbuhan ekonomi yang berkualitas, pemerintah melalui program *nawacita* berkomitmen untuk melaksanakan pembangunan mulai dari pinggiran dengan memperkuat daerah dan desa. Hal ini diantaranya dengan meningkatkan pembangunan desa melalui program dana desa. Lahirnya Undang Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang desa, merupakan wujud atas pengakuan negara terhadap desa, memperjelas terhadap fungsi serta kewenangan desa, memperkuat kedudukan desa dan masyarakat desa sebagai subjek dalam pembangunan sehingga diperlukannya suatu kebijakan untuk penataan dan pengaturan tentang desa. Undang undang tersebut memberikan mandat kepada pemerintah untuk mengalokasikan dana desa yang dianggarkan setiap tahun dalam Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (APBN) untuk diberikan kepada setiap desa sebagai salah satu sumber pendapatan desa.

Pengalokasin dana desa dalam APBN dilaksanakan mulai tahun anggaran 2015 sesuai amanat yang tertuang dalam UU No. 6 Tahun 2014. Total dana desa mulai tahun 2015 sampai tahun 2022 telah mencapai Rp468,9 triliun, dan terus mengalami peningkatan setiap tahunnya. Alokasi

dana desa yang pertama kali dianggarkan yaitu pada tahun 2015 sebesar Rp20,8 triliun, dan pada tahun 2021 dana desa dialokasikan sebesar Rp72 triliun atau meningkat lebih dari 3,5 kali lipat dibandingkan tahun 2015. Sementara itu pada tahun 2022 alokasi dana desa dianggarkan sebesar Rp68,0 triliun dengan jumlah desa sebanyak 74.960 desa.

Adanya peningkatan jumlah dana desa yang diikuti dengan menurunnya tingkat kemiskinan ini kemudian diduga berpengaruh dalam mengatasi jumlah kemiskinan di Indonesia. Hal ini karena jumlah dana desa yang dianggarkan pemerintah hampir selalu mengalami kenaikan, sementara pada tahun yang sama, tingkat kemiskinan yang terjadi selalu mengalami penurunan. Oleh karena itu, secara tidak langsung dana desa diduga memiliki pengaruh dalam menurunkan tingkat kemiskinan yang ada melalui pertumbuhan ekonomi.

Sesuai instruksi Presiden Joko Widodo, pemanfaatan anggaran dana desa harus dirasakan oleh seluruh warga desa di Indonesia. Dampak pembangunan desa juga harus lebih dirasakan melalui pembangunan desa yang terfokus. Oleh karena itu, pada tahun 2021 anggaran dana desa dialihkan sebagian menjadi jaring pengaman sosial melalui program Bantuan Dana Tunai Langsung Dana Desa (BLT DD).

Bantuan Langsung Tunai atau BLT adalah program bantuan pemerintah berjenis pemberian uang tunai atau beragam bantuan lainnya, baik bersyarat maupun tak bersyarat untuk masyarakat miskin. BLT merupakan upaya pemerintah untuk menjaga konsumsi masyarakat dalam

menghadapi berbagai dampak gejala ekonomi global. Ketika perekonomian melemah, satu-satunya yang bisa diharapkan adalah stimulus keuangan yang merupakan kebijakan pemerintah. Program BLT ini sangat membantu dalam mendorong konsumsi masyarakat. Sasaran penerima BLT ini merupakan masyarakat miskin yang masih membutuhkan bantuan ekonomi, masyarakat yang belum terdata pada kelompok penerima bantuan sosial lainnya, dan masyarakat yang memiliki anggota keluarga dengan sakit kronis.

Rincian pencairan BLT DD, pada Januari 2021 sudah tersalurkan Rp.1,28 triliun dengan penerima manfaat lebih dari 4,27 juta keluarga. Di Februari 2021 sudah tersalurkan ke 2,8 juta penerima manfaat dengan total dana tersalurkan mencapai Rp.850 miliar. Pada bulan Maret 2021 sudah dicairkan sebesar Rp.507 miliar kepada 1,6 juta penerima manfaat. Kemudian pada April sudah tersalurkan Rp.294 miliar kepada 980 ribu penerima manfaat. Dan pada Mei 2021 sudah dicairkan Rp.159 miliar kepada 531 ribu penerima manfaat.

Anggaran BLT yang dikeluarkan pemerintah selalu mengalami peningkatan setiap tahunnya. Jumlah yang terus mengalami peningkatan ini kemudian menimbulkan dugaan bahwa BLT juga berperan dalam mengatasi tingkat kemiskinan di Indonesia. Adanya BLT diduga mampu menurunkan tingkat kemiskinan yang ada di Indonesia.

Anggaran BLT ini memang ditujukan kepada masyarakat ekonomi kelas bawah. Seperti yang diketahui bahwa masyarakat ekonomi bawah ini

juga melakukan transaksi di komunitas lokal. Adanya BLT yang diterima kemudian mampu meningkatkan daya beli masyarakat pada komoditas lokal tersebut. Hal ini kemudian akan menimbulkan iklim yang baik pada ekonomi masyarakat lokal. Oleh karena itu, pertumbuhan ekonomi diduga berperan dalam memperkuat pengaruh dana desa terhadap kemiskinan secara tidak langsung.

Berdasarkan uraian tersebut, peneliti tertarik melakukan penelitian dengan judul “**Pengaruh Dana Desa dan Bantuan Langsung Tunai (BLT) terhadap Kemiskinan di Indonesia melalui PDRB tahun 2021-2022**”.

B. Identifikasi Masalah

Berdasarkan masalah yang telah dijelaskan pada latar belakang penelitian, peneliti mengidentifikasi masalah-masalah yang ada dalam penelitian ini sebagai berikut:

1. Kemiskinan di Indonesia dipengaruhi oleh pertumbuhan ekonomi, pendidikan, pengangguran, dan pengeluaran pemerintah.⁵ Pertumbuhan ekonomi negara diukur dengan PDB, sementara daerah PDRB .
2. Produk Domestik Bruto dipengaruhi oleh konsumsi, investasi, pengeluaran pemerintah, dan ekspor-impor.⁶

⁵ Aziz, Gamal Abdul, dkk, *Faktor yang Mempengaruhi Kemiskinan di Kabupaten Kutai Karta Negara*, (Jurnal Ekonomi Keuangan, dan Manajemen, Vol.12 No.1, 2016) hal :38

⁶ Susanti,dkk,Indikator-Indikator Makroekonomi,(Fakultas Ekonomi Universitas Indonesia,2007)

3. Dana desa dan BLT termasuk pengeluaran pemerintah.
4. Bantuan Langsung Tunai merupakan pengeluaran pemerintah yang diduga mempengaruhi konsumsi masyarakat melalui peningkatan kemampuan belanja setelah adanya bantuan.

C. Rumusan Masalah

Dari penjabaran latar belakang, maka rumusan masalah dari penelitian ini adalah sebagai berikut :

1. Apakah Dana Desa berpengaruh terhadap PDRB di Indonesia?
2. Apakah BLT berpengaruh terhadap PDRB di Indonesia?
3. Apakah Dana Desa berpengaruh terhadap kemiskinan di Indonesia?
4. Apakah BLT berpengaruh terhadap kemiskinan di Indonesia?
5. Apakah PDB berpengaruh terhadap kemiskinan di Indonesia?
6. Apakah Dana Desa berpengaruh terhadap kemiskinan melalui PDRB di Indonesia?
7. Apakah BLT berpengaruh terhadap kemiskinan melalui PDRB di Indonesia?

D. Tujuan Penelitian

Berdasarkan rumusan masalah di atas, maka tujuan penelitiannya sebagai berikut :

1. Untuk mengetahui pengaruh dana desa terhadap PDRB di Indonesia
2. Untuk mengetahui pengaruh BLT terhadap PDRB di Indonesia

3. Untuk mengetahui pengaruh dana desa terhadap kemiskinan di Indonesia
4. Untuk mengetahui pengaruh BLT terhadap kemiskinan di Indonesia
5. Untuk mengetahui pengaruh PDRB terhadap kemiskinan di Indonesia
6. Untuk mengetahui pengaruh dana desa terhadap kemiskinan di Indonesia melalui PDRB
7. Untuk mengetahui pengaruh BLT terhadap kemiskinan di Indonesia melalui PDRB

E. Kegunaan Penelitian

Dengan diadakannya penelitian ini diharapkan mampu memberikan sumbangsih terhadap dunia akademisi, masyarakat umum, para stakeholder dan pribadi penulis.

1. Secara Teoritis

Hasil dari penelitian ini diharapkan mampu memberikan manfaat secara teoritis atau akademis sebagai sumber informasi tambahan dan membantu perkembangan keilmuan khususnya dalam bidang studi kajian ilmu ekonomi mengenai pengaruh dana desa, bantuan langsung tunai (BLT) terhadap kemiskinan melalui PDRB.

2. Secara Praktis

a. Bagi pemerintah

Hasil penelitian ini diharapkan mampu memberi informasi mengenai faktor-faktor yang mempengaruhi kemiskinan, sehingga

dapat dijadikan sarana evaluasi untuk mengambil kebijakan selanjutnya guna menyelesaikan permasalahan dalam kemiskinan.

b. Bagi peneliti selanjutnya

Hasil penelitian ini diharapkan dapat digunakan sebagai bahan literasi dan perbandingan untuk penelitian selanjutnya, guna menambah ilmu pengetahuan khususnya bagi pihak yang tertarik melakukan penelitian dengan variabel yang sama.

F. Ruang Lingkup dan Keterbatasan Penelitian

1. Ruang Lingkup Penelitian

Ruang lingkup dalam penelitian ini mencakup dua variabel independen, yaitu dana desa dan bantuan langsung tunai (BLT), kemiskinan sebagai variabel dependen, dan PDRB sebagai variabel intervening. Penelitian ini menggunakan sampel data selama 2 tahun yaitu tahun 2021 hingga 2022, di 33 provinsi seluruh Indonesia. Dengan sampel data sebanyak 33 provinsi diharapkan mampu mempresentasikan bagaimana pengaruh dana desa dan bantuan langsung tunai (BLT) terhadap kemiskinan melalui PDRB di Indonesia.

2. Keterbatasan Penelitian

- a. Batasan pada penelitian berfokus pada pengukuran dana desa, dan bantuan langsung tunai (BLT) terhadap tingkat kemiskinan melalui PDRB tahun 2021-2022.

- b. Keterbatasan data penelitian hanya menggunakan data sekunder yang bersumber dari Badan Pusat Statistik (BPS) dan laman resmi Kementerian Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal dan Transmigrasi Republik Indonesia (Kemendesa).

G. Penegasan Istilah

1. Definisi Konseptual

- a. Dana Desa

Dana Desa adalah dana yang bersumber dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (APBN) yang diperuntukkan bagi desa yang ditransfer melalui Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) kabupaten/kota dan digunakan untuk membiayai penyelenggaraan pemerintahan, pelaksanaan pembangunan, pembinaan kemasyarakatan, dan pemberdayaan masyarakat.⁷

- b. Bantuan Langsung Tunai (BLT)

Bantuan Langsung Tunai atau disingkat BLT adalah program bantuan pemerintah berjenis pemberian uang tunai atau beragam bantuan lainnya, baik bersyarat maupun tak bersyarat untuk masyarakat miskin.⁸

⁷ <https://sid.kemendesa.go.id/village> diakses pada, 4 Desember 2023 pukul 22.11 WIB

⁸ https://id.wikipedia.org/wiki/Bantuan_langsung_tunai diakses pada, 4 Desember 2023 pukul 22.19 WIB

c. Kemiskinan

Kemiskinan adalah keadaan saat ketidakmampuan untuk memenuhi kebutuhan dasar seperti makanan, pakaian, tempat berlindung, pendidikan, dan kesehatan.⁹

d. Produk Domestik Bruto (PDRB)

Produk Domestik Regional Bruto (PDRB) adalah jumlah nilai tambah atas barang dan jasa yang dihasilkan oleh berbagai unit produksi di wilayah suatu daerah dalam jangka waktu tertentu (biasanya satu tahun).¹⁰

2. Definisi Operasional

Definisi operasional merupakan definisi variabel secara nyata dan riil dalam konteks yang diteliti. Secara operasional, penelitian ini bertujuan untuk menguji bagaimana pengaruh dana desa dan bantuan langsung tunai (BLT), terhadap kemiskinan melalui PDRB yang terjadi di Indonesia.

H. Sistematika Penulisan

Sistematika penulisan skripsi pada penelitian ini akan disajikan dalam 6 bab, dan di setiap bab akan terdapat sub bab sebagai penjelasan dari bab tersebut. Berikut sistematika penulisan penelitian adalah sebagai berikut :

⁹ <https://djp.kemenkeu.go.id> diakses pada, 4 Desember 2023 pukul 22.22 WIB

¹⁰ <https://www.bps.go.id> diakses pada, 4 Desember 2023 pukul 22.26 WIB

BAB I PENDAHULUAN Secara garis besar pendahuluan berisi mengenai latar belakang masalah, identifikasi masalah, rumusan masalah, tujuan penelitian, kegunaan penelitian, batasan masalah, penegasan istilah, dan sistematika penulisan.

BAB II LANDASAN TEORI Dalam bab landasan teori ini mencakup tentang hasil-hasil penelitian terdahulu yang memiliki kaitan dengan penelitian yang dilakukan. Landasan teori ini juga memuat kerangka berpikir teoritis mengenai kemiskinan, produk domestik regional bruto, dana desa, bantuan langsung tunai, kerangka konseptual, dan hipotesis penelitian.

BAB III METODE PENELITIAN Pada bab ini menjelaskan mengenai tentang rancangan penelitian yang berisi pendekatan dan jenis penelitian, populasi sampling dan sampel, sumber data dan variabel penelitian, teknik pengumpulan data dan instrumen penelitian serta menganalisis data.

BAB IV HASIL PENELITIAN Pada bab ini akan menguraikan hasil penelitian yang berisi tentang paparan data dan pengujian hipotesis yang menjelaskan tentang temuan penelitian untuk masing-masing variabel dalam penelitian.

BAB V PEMBAHASAN Dalam bab ini dijelaskan tentang analisis cara melakukan konfirmasi antara temuan penelitian dengan teori dan penelitian yang ada serta jawaban dari rumusan masalah.

BAB VI PENUTUP Pada bab ini menguraikan mengenai rangkuman dan menarik kesimpulan dari permasalahan penelitian dan pembahasan yang telah dilakukan. Pada penutup juga berisi mengenai saran-saran yang diberikan oleh peneliti kepada pihak yang terkait dalam penelitian ini.